

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2021**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
dalam Ilmu Ekonomi Islam**

OLEH
NUR FAIZAH
NIM: 16810075

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018 - 2021**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh

NUR FAIZAH

NIM: 16810075

Dosen Pembimbing

Dr. ABDUL QOYUM, S.E.I., M.Sc., Fin

NIP. 19850630 201503 1 007

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1402/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018 - 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16810075
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
SIGNED

Valid ID: 64cefa968b9b2



Penguji I

Lailatis Syarifah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64efe34a54c5b



Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64fedcd9630e



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640213b7ee33

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Faizah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Faizah

NIM : 16810075

Judul Skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 - 2021”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Abdul Qovum, S.E.I., M.Sc., Fin
NIP. 19850630 201503 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Faizah

NIM : 16810075

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 - 2021” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Faizah
16810075

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Faizah

NIM : 16810075

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Nur raizah
NIM. 16810065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS Al-Baqarah : 216)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang

tua saya Bapak Tumingan dan Ibu Umi Kulsum yang

senantiasa mendukung pendidikan saya selama ini

serta

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Ahamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada penyusun sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi junjungan Nabi Muhammad Sholallohu 'alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang memperoleh syafa'atnya kelak di hari akhir.

Penelitian ini merupakan ujung tugas akhir guna menyelesaikan Pendidikan stata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga untuk memperoleh gelar S.E. Keberhasilan penulis dalam menyusun penelitian ini tidaklah luput dari banyak kekurangan serta kontribusi orang-orang terdekat yang mampu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan penyusunan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan syukur, terimakasih dan hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.Sc.Fin. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.S.c.Fin. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan motivasi.

5. Bapak Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama saya menjalani Pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua yaitu Bapak Tumingan dan Ibu Umi Kulsum serta adik Muhammad Rifki Maulana yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan dan semangat tanpa henti.
9. Keluarga besar dan teman – teman di Lampung yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa henti.
10. Teman – teman kamar A-Three (Bundel, Milna, Ti'ah, Ikmal, Wahyu, Isna, Jundi, Janah, Rahma, Mailan, Novi, Faiq) terimakasih atas kegilaan untuk setiap harinya, serta dukungan, suport, dan do'anya untuk saya.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2016, khususnya teman – teman di akhir perjuangan ini (Heni Mala, Arum, Dewi Novita, Rumi, Nova, Ismadanaf, Gilang) yang selalu saling suport dan mendukung.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi selama menjalani Pendidikan di Yogyakarta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Penyusun,



Nur Faizah

NIM. 16810075



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Konsep Otonomi Daerah.....	11
2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	16
3. Pendapatan Asli Daerah	23
4. Dana Perimbangan.....	27
5. Jumlah Penduduk.....	31
B. Telaah Pustaka.....	32
C. Pengembangan Hipotesis	36
1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengeluaran Pemerintah	36
2. Hubungan antara Dana Primbangan dengan Pengeluaran Pemerintah	37
3. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran Pemerintah	37
D. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Definisi Operasional Variabel.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
1. Common Effect Model (CEM).....	42
2. Fixed Effect Model (FEM).....	43
3. Random Effect Model (REM)	43

4. Uji Chow	44
5. Uji Hausman	44
6. Uji Lagrange Multiplier	45
7. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	45
8. Koefisiensi Determinasi (R ²)	46
9. Uji Parsial (Uji-t)	46
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Penelitian	47
1. Pendapatan Asli Daerah	47
2. Dana Perimbangan	49
3. Jumlah Penduduk	51
B. Hasil Estimasi Regresi	52
1. <i>Common Effect Model</i>	52
2. <i>Fixed Effect Model</i>	53
3. <i>Random Effect Model</i>	54
C. Pemilihan Model	55
1. Uji <i>Chow</i>	55
2. Uji <i>Hausman's</i>	55
D. Hasil Estimasi Pemilihan Model (<i>Fixed Effect</i>)	56
1. Uji F	57
2. Pengujian Koefisien Determinasi (R ²)	57
3. Uji T	58
E. Analisis Hasil Regresi Data Panel	58

1. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengeluaran Pemerintah	59
2. Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Pengeluaran Pemerintah ...	59
3. Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran Pemerintah	60
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan	61
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pengeluaran Daerah 15 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung	5
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk 15 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Periode 2018 - 2021	6
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Common Effect Model	52
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Fixed Effect Model	53
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Random Effect Model.....	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow.....	55
Tabel 4. 5 Hasil Hausman's Test.....	56
Tabel 4. 6 Uji Pemilihan Model (Fixed Effect).....	57



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4. 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Lampung 2018 - 2021 .. 48
- Grafik 4. 2 Dana Perimbangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 50
- Grafik 4. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Lampung 2018 – 2021 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk Tahun 2018 – 2021	67
Lampiran II Statistik Deskriptif.....	70
Lampiran III Hasil Common Effect Model.....	71
Lampiran IV Hasil Fixed Effect Model	72
Lampiran V Hasil Random Effect Model	73
Lampiran VI Hasil Chow Test	74
Lampiran VII Hasil Hausman’s Test	75
Lampiran VIII Curriculum Vitae	76

ABSTRAK

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus setiap daerah masing – masing, termasuk kebijakan dalam anggaran pengeluaran daerahnya. Pengalokasian dana di suatu daerah harus tepat pada sasaran, karena dana termasuk salah satu alat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi dan mandirinya suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018 – 2021 yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan kriteria metode sampling yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan teknis analisis *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan menggunakan *Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif tapi tidak signifikan.

Kata Kunci : *Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, PAD, Pengeluaran Pemerintah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Decentralization is the handover of government authority by the central government to autonomous regions to regulate and manage each region, including policy policies in their regional expenditure budgets. The allocation of funds in a region must be right on target, because funds are one of the tools to reduce the gap in economic development and independence of a region. This study aims to determine the level of expenditure of districts / cities in Lampung Province in 2018 – 2021 which is influenced by other factors The objects used in this study are 15 regencies/cities in Lampung Province with the criteria of the sampling method used. This study used panel data with Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect analysis techniques using Eviews 12. The results of this study show that the variables PAD and Balancing Fund have a positive and significant effect on government spending, while the population has a positive but not significant effect.

Keywords : Balancing Fund, Number of Population, PAD, Government Expenditure



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor - faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi. Di lain pihak sumber penerimaan yang terbatas harus diusahakan untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998). kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber - sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya

dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah pada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Purnomo, 2010).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda - beda.

Menuju penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah - daerah yang mengalami kapasitas fiskal kecil (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan

proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor - sektor yang produktif di daerah.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Purnomo, 2010)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendapatan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain - lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. (Tri f, 2011)

Bagi Provinsi Lampung, otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan karena otonomi daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak

dapat dipandang sebagai sebuah kegagalan. Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Maka melalui pengolahan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber - sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi - fungsi pemerintahannya (M.T.Ritonga, R. Arief, & D. Suwandi, 2000). rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagai fungsi - fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas.

Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber - sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001)).

Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya jika hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan. Adapun jumlah pengeluaran pemerintah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut

Tabel 1. 1 Jumlah Pengeluaran Daerah 15 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung
Periode Anggaran 2018 - 2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Ribuan Rupiah)
1	2018	21.286.381.763,52
2	2019	22.1194.208.22,25
3	2020	21.774.909.732,36
4	2021	21.138.413.311,42

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019 - 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah seluruh pengeluaran daerah di Provinsi Lampung setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dari tahun 2018 namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan untuk dua tahun berikutnya.

Belanja Pemerintah Provinsi Lampung atau pengeluaran pemerintah berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah

desa. Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik.

Untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut diperlukan adanya sumber keuangan yang cukup. Sumber - sumber keuangan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk 15 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Periode 2018 - 2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ribuan Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Nilai	Nilai	Jiwa
1	2018	21763769643.82	15401585464.78	8370485
2	2019	22542810802.06	15344949788.71	8447737
3	2020	20960763048.17	14185654988.95	9007848
4	2021	21479522646.66	14341289314.12	9081792

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019 - 2021, diolah

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian (*research gap*) di mana hasil penelitian Ririn Anggraeni (2022); Kustiyono Tri F (2011) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah.

Sedangkan hasil penelitian dari Nur Fadilah Arsyad (2021) memperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kustiyono Tri F (2011); Dahliah (2022); Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi (2014) terkait hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah/Belanja Daerah menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardita Tri Handayani, dkk (2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Beberapa Variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 - 2021**. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah, PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah daerah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah daerah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 – 2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 – 2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 – 2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai Pengeluaran Pemerintah di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 – 2021 untuk selanjutnya bagi pemerintah daerah dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan fiskalnya (keuangan), sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan memiliki alur yang sangat berkaitan satu sama lain, secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab tersebut yaitu:

Bab pertama, bagian ini berupa pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan gambaran umum penulisan penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun baik berupa manfaat secara akademik maupun praktis, serta sistematika pembahasan yang merupakan gambaran secara singkat alur penyusunan penelitian ini.

Bab kedua, berupa landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: telaah pustaka yang berisikan kutipan kutipan teori serta hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Landasa teori sendiri menjadi acuan dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian yang akan diteliti selanjutnya.

Bab ketiga berisi paparan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian tersebut akan menjelaskan mulai dari jenis penelitian apa yang akan dilakukan, teknik perolehan data dan sumbernya, definisi operasional variabel, serta penjelasan alat analisis statistik yang digunakan serta asumsi-asumsi yang digunakan untuk mengolah data.

Bab keempat, terdiri atas uraian analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pembahasan lebih lanjut dari hasil penelitian tersebut.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian yang berisi kekurangan penyusun dalam melakukan penelitian ini serta saran yang diberikan penyusun untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengujian, analisis, dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, di mana Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka jumlah Pengeluaran Pemerintah pun juga semakin meningkat.
2. Dana Perimbangan menunjukkan hubungan yang positif secara signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, di mana Dana Perimbangan mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah melalui fungsinya sebagai alat pemerata kesenjangan antar daerah.
3. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Di mana dalam penelitian ini menunjukkan H_3 ditolak. Dengan demikian, Jumlah Penduduk tidak mampu mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah masing – masing daerah secara signifikan.

B. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak ditemukan sejumlah kekurangan dan keterbatasan. Adapun kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah:

1. Terbatasnya data variabel yang digunakan karena kurang lengkapnya data yang telah dipublikasi

2. Keterbatasan penggunaan tahun terbaru
3. Kurangnya penelitian terdahulu terkait Pengeluaran Pemerintah yang mendukung referensi penelitian.

C. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh di atas, diketahui bahwa dari tiga variabel menunjukkan 2 variabel berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, sedangkan satu variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah. Dengan demikian, dapat dilakukan beberapa Langkah efektif untuk memanfaatkan faktor – faktor tersebut guna menyeleraskan Pengeluaran Pemerintah dengan pendapatan daerah melalui kebijakan anggaran Pengeluaran Pemerintah. Adapun Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi atau salah satu sumber pengeluaran pemerintah dengan memanfaatkan sektor – sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat menjadi daerah yang mandiri karena dapat membiayai belanja pegawai atau sarana prasarannya sendiri. Jadi pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam seperti tempat – tempat wisata ataupun memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki kekayaan alam untuk diolah dan dijadikan pemasukan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mendukung berbagai upaya guna menyeleraskan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Selain itu evaluasi kebijakan mengenai penyaluran dan pengalokasian dana transfer seperti Dana Perimbangan perlu ditingkatkan untuk menghindari penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini

dimaksudkan agar tujuan pemerintah dengan dana transfer sebagai alat pemerataan Pembangunan dapat terealisasi dengan baik. (Faradilla, 2017)

3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Di mana dalam penelitian ini H_3 ditolak. Dengan demikian Pemerintah daerah perlu menata kembali kebijakan kependudukan di wilayah masing – masing. Selain itu pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya Pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang peranan Masyarakat dalam keikutsertaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M, & Nasution, D.P. (2018). Analisis Kualitatif Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa yang diberi Pembelajaran Matematika Realistik. *Jurnal Gantang*, 83 - 95.
- Amiruddin, I. (2018). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Argi, R. (2011). Analisis Belanja Daerah dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004 - 2009. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2018 - 2021)
- Bailey, W. (1995). Decentralization, Governance and Public Services The Impact Of Institutional Arrangements. *IRIS Center*.
- Dianova, A, & Nahumury, J. (2019). Investigating the Effect of Liquidity, Leverage, Sales Growth and Good Corporate Governance on Financial Distress. *Journal Of Accounting and Strategic Finance*, 143 - 156.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Faradilla, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Periode 2010 - 2016. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics, Fort Edition, Singapore*. New York: McGraw-Hill.
- Hakim, A. (2012). Teknik dan Analisis Ekonomi.

- Halim, A. (2001). Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK.STIE YO*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba 4.
- Kaho, R. (1998). *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaloh, J. (2004). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- kramer. (2018). analisis. *akuntansi*, 56 -60.
- M.T.Ritonga, R. Arief, & D. Suwandi. (2000). *Pelajaran Akuntansi Untuk SMU*. Jakarta: Erlangga.
- Machfud Sidik, S. (1992). *Perekonomian Makro dan Mikro*.
- Mahulete, U. (2016). Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Mangkoesebroto, M. (1993). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pangesti, N. (2020). Pengaruh Daya Saing Global terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tujuh Negara ASEAN Tahun 2007 - 2017. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Portal SIKD Provinsi Lampung (2018 - 2021)
- Purnomo, N. S. (2010). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. *Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*.
- Republik Indonesia. (1999). Undang - Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

- Samudra, A. (1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 46 - 58.
- Soetrisno. (1986). Dasar - dasar Ilmu Keuangan Negara. *BPFE*.
- Soewondo, M. S. (1992). *Perekonomian Makro dan Mikro*.
- Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung (2018 - 2021)
- Tri f, K. (2011). Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2008 - 2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Wajong, J. (1960). *Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah - Daerah*. Jakarta: Satadarma.
- Widarjono, A. (1999). Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 4 No 2.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirosardjono, S. (1998). Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa. *Prisma*, No 3.